



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MAXI R. RONDONUWU**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **97845**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 8.976.940.000

1. Tanah Seluas 14500 m2 di KAB / KOTA MINAHASA TENGGARA, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1196 m2/517 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 3810 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Bangunan Seluas 317.56 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 752 m2/985 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000
6. Tanah Seluas 28380 m2 di KAB / KOTA MINAHASA TENGGARA, WARISAN Rp. 245.000.000
7. Tanah Seluas 34.672 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
8. Tanah Seluas 29.968 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
9. Tanah Seluas 10.022 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/297 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 4.743.940.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 550.000.000



1. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	
380.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA TRUK Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	
170.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	81.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.803.462.606
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	12.411.802.606
III. HUTANG	Rp.	3.865.661.818
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.546.140.788

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.